



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor : 700.1.2.1/ /Inspektorat

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Kesehatan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menyiapkan data dukung laporan kinerja sesuai petunjuk teknis.
2. Capaian kinerja akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lanjutan dengan pimpinan.
3. menganalisis faktor penyebab kegagalan dalam capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP.
4. LKIP akan digunakan sebagai bahan dasar penyesuaian kinerja dan akan di evaluasi berkala capaian per triwulan.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Kesehatan**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **84.75** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	30	27.25	90.83%
b. Pengukuran Kinerja	30	26.6	28	93.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.1	9.5	63.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22	20	80.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	87.7	84.75	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

- Dokumen Perencanaan Kinerja ada yang belum diformalkan.
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) kurang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) kurang memenuhi kriteria SMART.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan.
- Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
- Aktivitas yang dilaksanakan kurang mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

2.) Pengukuran Kinerja

pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dan tahunan

3.) Pelaporan Kinerja

- Informasi yang tersaji hanya sebatas formalitas
- Dokumen LKIP belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- Rekomendasi yang dilampirkan bukan rekomendasi LKIP secara keseluruhan tetapi upaya yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang
- Analisa butuh pendalaman lebih lanjut untuk menjawab permasalahan
- Rekomendasi LKIP tidak digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja
- Tidak terdapat perubahan budaya organisasi

4.) Evaluasi Internal

1. Rencana Aksi tindak lanjut LHE AKIP 2024 belum sepenuhnya relevan dengan rekomendasi LHE AKIP. Bahwa tidak ada bukti terlampir dimana pengukuran kinerja telah dijadikan dasar penambahan/pengurangan tunjangan kinerja.

2. Laporan Monev Renaksi hanya berupa tabel Rencana Aksi TL LHE SAKIP.

3. Terdapat penurunan nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja, dari nilai 11,10 di tahun 2023 turun menjadi 9,1 di tahun 2024.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

- lengkapi agar semua dokumen perencanaan di formalkan (ditandatangani dan di stempel)
- agar diperbaiki sesuaikan dengan Pohon kinerja (target terkait stunting belum masuk
- Lengkapi dengan crosscutting (stunting)
- Agar diperbaiki rencana aksi sesuai dengan e SAKIP
- upload ulang bukti dukung yang telah memuat hasil prevalensi stunting 2024

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

- Dokumen LAKIP agar menyajikan data analisis penyebab yang lebih mendalam dan menjawab permasalahan.
- Sajikan rekomendasi yang lebih substansi menjawab permasalahan
- Sajikan data dan eviden terkait tindaklanjut dari rekomendasi/upaya yang akan dilakukan dimasa yang akan datang merubah rencana aksi
- Sajikan analisis penyebab kegagalan yang lebih komprehensif menjawab permasalahan
- Menjadikan rekomendasi LKIP sebagai perubahan penyesuaian perencanaan kinerja
- Agar Menjadikan LKIP sebagai dasar pemberian penghargaan

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Rencana Aksi TL LHE agar lebih spesifik dan/atau melampirkan pemenuhan bukti dukung sesuai rekomendasi LHE.
2. Laporan Monev Renaksi agar disajikan secara utuh yang memuat Pendahuluan, Isi dan Kesimpulan serta link bukti dukung.
3. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja berdasarkan pengukuran tahunan yang telah dilakukan dengan berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Kesehatan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Kesehatan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka